

Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru

Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD)

Nidya Vitriana¹, Agustiawan², Muhammad Ahyaruddin³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: nidyavitriana1107@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah mengembangkan teknologi di bidang keuangan yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi perencanaan keuangan dan aset daerah serta untuk mengetahui keunggulan aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi SIPKD yang sebelumnya digunakan BPKAD Pekanbaru. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini dianalisa menggunakan *interactive model analysis*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Keunggulan SIPD adalah memiliki cakupan yang lebih luas dan terintegrasi ke seluruh OPD yang ada di Indonesia.

Kata kunci : Implementasi, Efektivitas, Keunggulan SIPD

ABSTRACT

The government develops technology in the financial sector, namely the Regional Government Information System (SIPD). This study aims to find out how the implementation of SIPD in BPKAD Pekanbaru City, and to find out how the effectiveness of SIPD in BPKAD Pekanbaru City in supporting information on regional financial and asset planning and to find out the advantages of the SIPD application when compared to the SIPKD application previously used by BPKAD Pekanbaru. The object of the study is the application of SIPD in BPKAD Pekanbaru City. The subject of this study is BPKAD Pekanbaru City and the research informants are the head of the budget sector, the head of the treasury, and the accounting and reporting sub-fields. The type of data used in this study is qualitative descriptive data. There are two data sources used, namely primary data and secondary data. The data in this study were analyzed using interactive model analysis. Based on the results of the study, it shows that the implementation of SIPD in BPKAD Pekanbaru City has not been optimal and SIPD used by BPKAD Pekanbaru City in supporting regional financial management information has not been effective. The advantage of SIPD is that it has a wider scope and is integrated throughout the OPD in Indonesia.

Keywords : Implementation, Effectiveness, Advantages of SIPD

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat menjadi otonomi telah memberikan dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya, sehingga berdampak juga pada perubahan pengaturan sistem pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang sebelumnya adalah Permendagri No. 8 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Daerah. Kebijakan ini

ditetapkan pada September 2019 dengan adanya peraturan tersebut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk menerapkan aturan yang baru.

SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah (Putri, 2021).

Pada tahap awal penerapan SIPD ini banyak terjadi kendala dan masalah yang dialami beberapa instansi seperti sistem yang sering eror sehingga memperlambat pekerjaan instansi tersebut, dan beberapa instansi lebih memilih menggunakan sistem yang lama. Penelitian Fahzura dan Najamudin (2022) yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat menyatakan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dijalankan masih belum optimal. Penemuan lain ditemukan oleh Balqis dan Fadhly (2021) menyatakan bahwa berdasarkan analisa melalui poin mutu yang meliputi kategori dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan diperoleh bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah dapat diketahui bahwa dalam penerapan SIPD pada Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya sempurna, beberapa OPD masih mengalami kendala dalam penerapan aplikasi ini mulai dari sistem itu sendiri, sumberdaya, komunikasi, dan faktor lainnya.

Penetapan kebijakan baru oleh Kemendagri membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menerapkan aplikasi SIPD termasuk di Kota Pekanbaru. Penerapan SIPD di Kota Pekanbaru sendiri masih mengalami kendala, di kutip dari GoRiau.com “Gubernur Riau yang mengakui ada beberapa kendala dalam penerapan SIPD sesuai dengan Permendagri, sebagaimana diketahui akibat dari SIPD ini banyak terjadi masalah, salah satunya pencairan insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga sulitnya dinas melakukan kegiatan dalam postur APBD 2021”

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. BPKAD merupakan instansi yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan. BPKAD Kota Pekanbaru sudah mulai menggunakan aplikasi SIPD yang diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebelumnya, BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dalam pengelolaan informasi keuangan daerah. SIPKD yaitu sebuah aplikasi terpadu dari pemerintah yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan dengan asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel (Khoirunnisa, 2021). Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dan wawancara pendahuluan dengan bagian tenaga ahli BPKAD Kota Pekanbaru pada bulan Februari Tahun 2022 penulis menemukan beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru, karena biasanya BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIPKD, namun dengan adanya aturan baru dari Kemendagri yang mengharuskan seluruh OPD menggunakan SIPD. Penerapan SIPD di BPKAD Pekanbaru sendiri masih sampai tahap perencanaan dan penganggaran belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan hingga pertanggungjawaban, banyak pegawai yang masih kurang paham dalam menggunakan aplikasi, dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan data di SIPD, seringkali para pegawai melewatkan salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, dan sistem penggajian yang terhambat, SIPD sendiri masih mengalami error ketika banyak yang mengakses aplikasi ini khususnya pada jam kerja sehingga menghambat dalam proses penyusunan anggaran kas, dan pembuatan surat-surat penting. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan SIPD secara mendalam serta mengeksplorasi secara kualitatif apa yang terjadi sesungguhnya terkait penerapan SIPD.

Fokus penelitian ini yaitu: (1) bagaimana implementasi SIPD di Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi? (2) bagaimana efektivitas SIPD dalam menunjang informasi perencanaan keuangan dan aset daerah Kota Pekanbaru? (3) apa keunggulan aplikasi SIPD jika dibandingkan dengan aplikasi SIPKD?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Implementasi

Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program (Syahrudin, 2018). Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual *projects* dan kedua apakah program tujuan tersebut tercapai (Amanah, 2018). Dalam proses kebijakan publik sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi. Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui, Implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit (Nasution dan Nurwani, 2021). Konsep implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk peraturan disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dilakukan secara konsisten. Menurut Edward III tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yaitu, transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi.

2. Sumber daya

Dalam implementasi kebijakan dalam suatu organisasi para pelaksana kebijakan yang cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan akan mendorong implementasi kebijakan tersebut berhasil. Sumber daya lain adalah informasi. Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Adanya informasi mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu segala keterangan dalam bentuk tulisan, atau pesan pedoman, petunjuk, dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana dalam sumber daya juga merupakan sumber pendukung implementasi kebijakan. Semua sarana dan prasarana yang tersedia adalah faktor pendukung terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3. Sikap (disposisi)

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Sikap para pelaksana dalam menerima dan

melaksanakan suatu kebijakan tanpa paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi dilakukan dalam memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu *operating procedure* atau prosedur kerja baku standar dan fragmentasi. *Standard Operating System* (SOP) berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks. Selanjutnya ada fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi.

Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam pencapaian suatu target, sasaran atau suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Grandis, 2018). Efektivitas berupa sejauh mana organisasi dapat melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985) menyatakan bahwa terdapat 3 indikator yang dapat mengukur efektivitas yaitu:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya untuk mencapai keberhasilan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dengan menggunakan indikator pencapaian tujuan suatu kebijakan untuk melihat tingkat efektivitas kebijakan tersebut melalui seberapa jauh pencapaian kebijakan tersebut dalam melaksanakannya dengan tujuan yang telah dibuat.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran untuk melihat tingkat kemampuan dan potensi suatu kebijakan dengan menilai berdasarkan seberapa jauh kemampuan dan potensi yang dimiliki. Integrasi dapat dilihat melalui sosialisasi, pengembangan konsensus, komunikasi dengan organisasi lain dan faktor pendukung lainnya.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Suatu kebijakan yang diterapkan harus beradaptasi dengan lingkungan, jika kebijakan tersebut tidak akan bermasalah pada lingkungan maka dapat dikatakan mampu beradaptasi. Untuk itu efektivitas suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan adaptasinya

Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sekumpulan kegiatan dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk kegiatan suatu organisasi dalam membantu menyediakan informasi untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan serta dalam pengendalian pada sebuah organisasi (Fridayanthie dan Chater, 2016). Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (Nasution dan Nurwani, 2021).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 dikatakan bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Permendagri No. 70 Tahun 2019 menyatakan jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen tertentu. Sistem informasi pembangunan daerah memuat informasi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumberdaya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Informasi perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

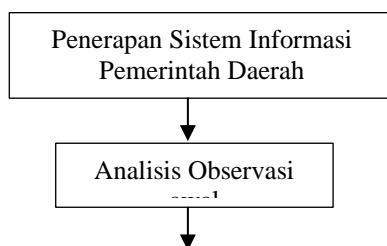
SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen tertentu.

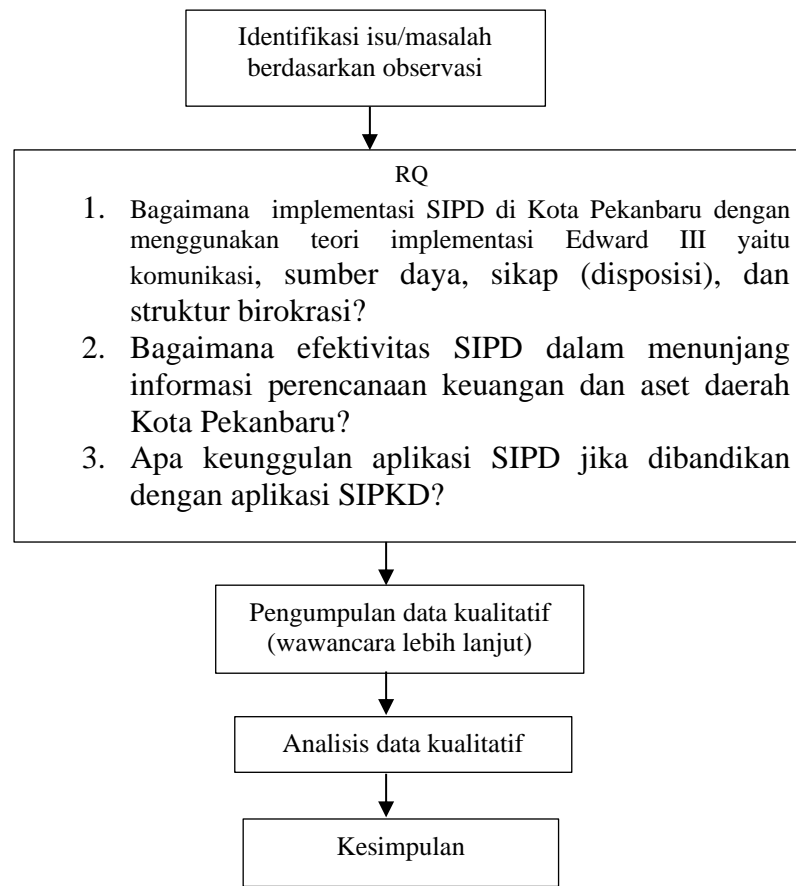
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan proses penyajian informasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh daerah dalam pelaporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun secara bertahap sesuai dengan kondisi pada masing-masing daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (Khoirunnisa, 2021).

Kerangka Penelitian

Penerapan aplikasi SIPD mulai diberlakukan pada Tahun 2020. Salah satu pemerintah daerah yang menerapkan aplikasi SIPD adalah Pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIPD di Kota Pekanbaru khususnya pada BPKAD Kota Pekanbaru dengan model penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Pengumpulan data kualitatif mendalam mengenai SIPD dengan pihak-pihak yang terlibat. Analisis data terdiri dari organisasi data, pemahaman untuk menemukan tema dan interpretasi dengan dikaitkan dengan dengan teori/konsep maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya.





Gambar2.1 kerangka penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti (Moeloeng, 2006). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan melalui tulisan dan gambar dan bukan angka-angka. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Komplek Kantor Walikota Gedung B3, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28285. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2022. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, berita, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah ketua bidang anggaran (R1), ketua bidang perbendaharaan (R2), dan sub bidang akuntansi dan pelaporan (R3). Narasumber tersebut berperan langsung dalam penerapan dan penggunaan aplikasi SIPD. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan model *interactive model analysis* dari (Miles dan Huberman, 1994) dengan melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, kemudian reduksi data, data dapat disederhanakan dan ditransformasikan dengan melakukan seleksi data secara ketat melalui uraian dan kemudian menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas, penyajian data dengan menggabungkan

informasi yang didapat agar dapat dianalisis lebih lanjut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi dalam pengujian kredibilitas, yaitu dengan cara pemeriksaan data dengan memanfaatkan hal-hal (data) untuk pengecekan dan perbandingan. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber dengan langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah yang bertugas membantu tugas walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2016 tentang Ketentuan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kota Pekanbaru mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, penyusunan dan pelaksanaan tugas serta kebijakan daerah pada urusan penunjang bidang keuangan dan aset daerah, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Implementasi aplikasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1. Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang dilakukan kurang efektif, sosialisasi hanya secara online, berdasarkan wawancara dengan kepala bidang anggaran (R1) menyatakan bahwa “Ada sosialisasi, namun sosialisasinya kurang efektif karena masa covid jadi cuma secara daring melalui zoom. Kalo secara praktiknya ya kami lakukan sendiri, tidak ada pelatihan yang khusus dari pusat, jadinya kami praktik sendiri terutama pada proses penganggaran karena proses penganggaran diharuskan menggunakan SIPD” Perintah penerapan SIPD juga tidak konsisten. Pada awal pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bahwasanya setiap OPD harus menggunakan SIPD. Namun setelah dilaksanakan terdapat banyak kendala yang dialami seperti sinkronisasi data, sehingga mengharuskan penggunaan aplikasi yang lama. Seperti yang disampaikan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan (R3) menyatakan “BPKAD Kota Pekanbaru saat ini menggunakan SIPD dan SIPKD, di bidang anggaran menggunakan SIPD, kemudian data tersebut kita salin lalu di pindahkan ke SIPKD. Di SIPKD ini sampai sekarang masih aman-aman saja tidak ada kendala untuk pengelolaan keuangan daerah, informasi di aplikasi ini sinkron dengan semua bidang. Jadi memang SIPD digunakan pada tahap perencanaan dan penganggaran saja”

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki BPKAD Kota Pekanbaru mendukung dalam penerapan SIPD, seperti yang dinyatakan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan (R1) “Sarana dan prasarana di BPKAD cukup memadai, mulai dari komputer yang tersedia cukup, internet juga lancar dan pegawai disini juga banyak, dalam mengimplementasikan SIPD ini kita saling berbagi informasi dengan OPD lain mengenai proses input dan output, sinkronisasi data dan progres perkembangan penggunaan SIPD. Pada awal penggunaan SIPD memang banyak kesulitan yang dihadapi khususnya pemahaman pegawai karena ini kan sistem baru dan sosialisasi juga kurang jadi wajar kalau ada kendala walaupun sarana dan

prasarana cukup, yang namanya sistem baru tentunya perlu proses adaptasi kalau sarana itu kan gunanya pendukung adaptasi sistem”

3. Sikap (disposisi)

Dalam hal sikap (disposisi) ini ditemukan adanya respon yang baik dari pada implementator mengenai SIPD, akan tetapi kurang setuju dengan mengharuskan penerapan yang begitu cepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub bidang akuntansi dan pelaporan (R2) menyatakan bahwa “Secara pribadi dengan adanya SIPD saya setuju, karena sistem ini memang dirancang untuk memudah sinkronisasi data antar OPD di Indonesia dan menyamakan sistem yang dipakai. Namun mewajibkan penerapannya secara cepat saya kurang setuju, karena kenyataannya sampai sekarang untuk penatausahaan dan pelaporan saja belum bisa dipakai, malah mempersulit OPD dengan menggunakan dua aplikasi. Sebenarnya tujuannya memang bagus, tapi dalam menyesuaikan sistem baru tentunya butuh persiapan dan waktu yang banyak agar ketika diimplementasikan tidak mempersulit, seharusnya memudahkan kita dalam menyinkronkan data”

4. Struktur birokrasi

Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan dan proses pelaksanaan penerapan SIPD pada BPKAD Kota Pekanbaru sudah cukup baik. Setiap masing-masing bidang mempunyai pengawas dan penanggung jawab di bidangnya, berdasarkan wawancara dengan kepala bidang perbendaharaan (R2) Standard Operating Procedures (SOP)/petunjuk manual yang berlaku apakah telah sesuai dengan permendagri No. 70 Tahun 2019 dan dapat dipatuhi oleh tim pengelola SIPD, R2 mengatakan bahwa “Semuanya sesuai dengan struktur organisasi dan tugas sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Disini kita juga punya pengawas di setiap bidang, jadi masing-masing kabid itu bertugas sebagai pengawas dan penanggung jawab di bidangnya” Koordinasi yang berjalan di BPKAD Kota Pekanbaru juga berjalan dengan baik, berdasarkan wawancara, tentang koordinasi yang berjalan antar tim pengelola SIPD dalam lokasi kerja, R3 selaku sub bidang akuntansi dan pelaporan mengatakan bahwa “Koordinasi di BPKAD berjalan dengan baik, maupun antar tim kerja berjalan sesuai dengan struktur organisasi. Semuanya sudah ada tugas masing-masing dan ada aturannya dan setiap pegawai wajib mengikuti aturan yang ada”

Efektivitas aplikasi SIPD

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tujuan perancangan SIPD adalah untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan pemerintah yang lebih inovatif, cepat, serta kreatif. SIPD juga bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan beserta penyusunan dokumen anggaran yang penginputannya telah terintegrasi di seluruh penjuru daerah. Dari hasil wawancara penelitian tentang bagaimana pelaksanaan SIPD dapat digunakan untuk mempermudah penyampaian informasi khususnya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pekanbaru, R1 selaku kepala bidang anggaran menyatakan bahwa “Pelaksanaan SIPD di bidang anggaran untuk saat ini masih aman, tidak ada kendala. Dengan adanya SIPD ini membuat pengolahan data perencanaan dan penganggaran daerah semakin efektif sehingga tidak perlu penambahan standar harga barang, kita tinggal klik saja kodenya lalu input, secara otomatis sistem yang bekerja. Dalam penyusunan anggaran dan penyampaian informasi masih aman lah, sesuai dengan ketentuan. Bahkan dari kebijakan ini ditetapkan sudah dikatakan bahwasanya mulai pada penyusunan anggaran Tahun 2021 menggunakan SIPD ini. Ya sampai saat ini sudah

dilaksanakan dengan baik” Dalam hal ini penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum mencapai tujuan yang sesuai dengan Permendagri.

2. Integrasi

Dalam pelaksanaan SIPD harus terdapat kesesuaian data antara informasi perencanaan pembangunan daerah dengan informasi keuangan daerah karena informasi ini harus sinkron untuk pengembangan pembangunan daerah hal ini diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang anggaran (R2) tentang sinkronisasi data yang dimiliki oleh BPKAD dengan OPD lain untuk pelaksanaan SIPD, R2 mengatakan bahwa “BPKAD telah memiliki kesesuaian data mengenai SIPD ini dengan OPD lain, khususnya Bappeda karena informasi yang disajikan harus sinkron tentunya. Dan ini juga diatur dan dijelaskan di dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 mulai dari perencanaan daerah bahkan sampai dengan analisis informasi pemerintah lainnya. Jadi untuk data sinkron lah tentunya”

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Proses adaptasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru untuk saat ini belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan, dan masih menggunakan SIPKD hal ini disampaikan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan (R3) yang mengatakan bahwa “bidang akuntansi dan pelaporan belum menggunakan SIPD. SIPD itu sekarang hanya bisa dipakai pada tahap perencanaan dan penganggaran untuk tahap pelaporan belum. Jadi SIPD itu kan dari Mendagri ya, idealnya sih kita tinggal pakai cuma sampe sekarang untuk penatausahaan dan pelaporan belum ada. Bukannya kita gak mau pakai, itu kan wajib harus diterapkan tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada. Jadi sekarang kami masih menggunakan *aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)*” Dalam menanggapi hal ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya OPD boleh menggunakan dua aplikasi yaitu SIPD dan aplikasi yang lama, dan di BPKAD Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi SIPD dan SIPKD. Penggunaan kedua aplikasi mempersulit dalam menyinkronkan data, seperti yang dikatakan oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan (R3) mengatakan “Kalau sekarang agak ribet ya, karena kan menggunakan dua aplikasi, dari perencanaan dan penganggaran menggunakan SIPD kemudian hasilnya di salin lalu di pindahkan ke SIPKD. Tapi kalau dulu semua bidang menggunakan SIPKD jadi masih enak langsung terkoneksi ke setiap bidangnya. Menurut saya SIPD ini belum bisa menampung semua informasi dari setiap OPD yang ada di Indonesia dan terkoneksi dengan baik, apalagi untuk laporan karena semuanya kan di catat seperti pembayaran, aset dan yang lainnya. Sedangkan SIPD ini terkoneksi secara online dan diakses oleh semua OPD yang ada di Indonesia, bayangkan berapa banyaknya OPD yang ada di Indonesia mengakses aplikasi ini, dan jika terjadi eror maka laporan tadi hilang. Makanya untuk saat ini SIPD masih tahap pengembangan oleh pemerintah, dan kita masih menunggu kejelasannya bagaimana”

Keunggulan SIPD di Bandingkan SIPKD

SIPD terhubung dengan setiap instansi yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD pada daerah tertentu yang menggunakannya, aplikasi lain yang mungkin digunakan OPD lain adalah SIMDA keuangan. Dengan adanya aplikasi SIPD menelaraskan proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah. SIPD mempunyai lingkup yang luas dan terintegrasi ke seluruh Indonesia sehingga data-data setiap instansi pemerintah terekam ke dalam satu server dan informasi yang dihasilkan saling terhubung.

Pembahasan

Implementasi aplikasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi SIPD maka peneliti menggunakan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut George Edward III sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan.

1. Komunikasi

Penerapan kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan (George Edward III, 1980). Kejelasan ukuran dan tujuan penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi yang berjalan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penerapan SIPD tidak efektif, dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya secara online dan tidak ada praktik khusus dalam penerapan SIPD serta komunikasi atau perintah awal juga tidak konsisten, pada awal pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bahwasanya setiap OPD harus menggunakan SIPD. Namun setelah dilaksanakan terdapat banyak kendala yang dialami seperti sinkronisasi data, sehingga mengharuskan penggunaan aplikasi yang lama sehingga tujuan penerapan SIPD tidak tercapai. Untuk mewujudkan implementasi SIPD salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran, dan untuk mewujudkan informasi tepat sasaran maka harus tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya.

2. Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan kebijakan, mulai dari sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup dan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan (George Edward III, 1980). Sumber daya yang tersedia di BPKAD Kota Pekanbaru telah memenuhi, mulai dari tersediannya sarana pendukung seperti komputer, internet dan SDM yang cukup. Dilihat di lapangan SDM yang ada di BPKAD mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian SIPD serta memiliki tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. BPKAD Kota Pekanbaru juga terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan untuk implementasi SIPD secara maksimal agar penerapannya bisa menyeluruh. Sumber daya lain adalah adanya informasi mengenai penerapan kebijakan ini yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, dan didukung Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah.

3. Sikap (disposisi)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (George Edward III, 1980). Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sikap implementator kurang setuju dengan penerapan SIPD yang cepat karena menyebabkan banyak kendala, namun dalam menanggapi hal ini BPKAD Kota Pekanbaru terus berupaya dalam penerapan SIPD lebih maksimal, untuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Menanggapi banyaknya keluhan dan kendala yang dihadapi OPD, Mendagri sendiri terus berupaya dalam pengembangan SIPD, untuk mencapai tujuan perancangan SIPD yaitu untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana (George Edward III, 1980). Berdasarkan struktur organisasi BPKAD Kota Pekanbaru, kepala badan merupakan jabatan tertinggi di BPKAD, yang mana merupakan penanggung jawab dalam proses implementasi SIPD. Komitmen kepala badan/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam mencapai optimalisasi penerapan SIPD pada BPKAD Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi yang dimiliki BPKAD Kota Pekanbaru mendukung dalam penerapan SIPD, mulai dari struktur organisasi yang dimiliki, dan setiap bidang mempunyai pengawas dan penanggung jawab yang mengakomodir setiap tugas pokoknya, dan memiliki SOP yang sesuai dengan peraturan dan dapat dipatuhi oleh pegawai, serta peran pemimpin yang mempunyai komitmen dalam penerapan SIPD hal ditunjukkan dengan penggunaan SIPD hingga saat ini dan terus berupaya agar penerapan SIPD lebih maksimal dan juga memiliki tanggung jawab dalam penerapan SIPD.

Efektivitas SIPD dalam menunjang informasi keuangan dan aset daerah

1. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tujuan perancangan SIPD adalah untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik yang diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaksanaan pemerintah yang lebih inovatif, cepat, serta kreatif. SIPD juga bertujuan untuk memberi kemudahan dalam pelaksanaan proses tahapan perencanaan beserta penyusunan dokumen anggaran yang penginputannya telah terintegrasi di seluruh penjuror daerah. Penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru saat ini masih sampai tahap perencanaan dan penganggaran, untuk tahap penggunaan SIPD sudah efektif dan tidak ada kendala seperti yang disampaikan kepala bidang anggaran (R1) namun dilihat dari tujuan perancangan aplikasi ini SIPD bukan hanya untuk menghasilkan informasi anggaran akan tetapi untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Peran BPKAD Kota Pekanbaru adalah memberikan layanan informasi Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu penerapan SIPD seharusnya bukan hanya di bidang anggaran, karena informasi mengenai anggaran hanya sebagian dari informasi keuangan daerah. Dalam hal ini penerapan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum mencapai tujuan yang sesuai dengan Permendagri.

2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru telah memiliki kesesuaian data antar OPD lain, kualitas informasi yang dihasilkan SIPD mengenai anggaran sudah sesuai dengan peraturan yang ada. BPKAD Kota Pekanbaru telah menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPD, dalam Permendagri pada bagian anggaran memuat informasi mengenai ketentuan dan pedoman penyusunan rancangan, serta penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mulai dari Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RKA SKPD, rancangan perda APBD, rancangan perkada

penjabaran APBD. Namun penggunaan SIPD baru sampai tahap penganggaran belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan, sehingga informasi mengenai penatausahaan dan pelaporan masih berdasarkan peraturan yang lama yaitu Permendagri No 13 Tahun 2006.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Proses adaptasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru untuk saat ini belum sampai tahap penatausahaan dan pelaporan, dan masih menggunakan SIPKD. Penerapan SIPD belum sepenuhnya, BPKAD Kota Pekanbaru masih menggunakan aplikasi SIPKD untuk tahap penatausahaan sampai tahap pelaporan. Hal ini karena SIPD merupakan sistem yang dirancang oleh Mendagri, dan dari Mendagri sistem ini baru bisa digunakan untuk tahap perencanaan dan penganggaran, sedangkan dalam tahap penatausahaan dan pelaporan belum bisa digunakan. Penggunaan dua aplikasi membuat bidang akuntansi dan pelaporan kesulitan dalam menyinkronkan data, sehingga harus menyalin informasi dari bidang anggaran, kemudian dipindahkan untuk digunakan bidang akuntansi dan pelaporan, sehingga dalam proses adaptasi, belum bisa dikatakan beradaptasi dengan baik karena masih banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh BPKAD Kota Pekanbaru.

Keunggulan SIPD di Bandingkan SIPKD

Dalam Permendagri dikatakan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, SIPD bertujuan untuk untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Artinya SIPD ini menghasilkan informasi yang terhubung antara setiap OPD, dan data-data di setiap daerah terangkum ke dalam satu sistem. Penerapan SIPD pada setiap instansi pemerintah untuk menyelaraskan penggunaan sistem sehingga mempermudah setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran, sehingga mendorong proses pelaksanaan pemerintah yang inovatif dan kreatif. Hal ini berarti SIPD terhubung dengan setiap instansi yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD pada daerah tertentu yang menggunakannya

SIMPULAN

Dari hasil analisis data maka dapat di simpulkan implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dengan menggunakan teori implementasi Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi belum optimal, terlihat dari komunikasi, dan sikap dari implementator yang kurang mendukung dalam penerapan kebijakan mempengaruhi implementasi SIPD. Komunikasi yang berjalan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah belum efektif, sosialisasi penerapan SIPD hanya secara online melalui via zoom sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan kurang jelas. Penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Dilihat dari pencapaian tujuan baru sampai tahap penganggaran, artinya belum sepenuhnya diterapkan, sehingga belum sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dan dari proses adaptasi mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian karena perbedaan sistem yang digunakan oleh bidang anggaran dan bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang lain. Sehingga belum bisa dikatakan beradaptasi dengan baik, maka dari itu dapat disimpulkan penggunaan SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Keunggulan SIPD adalah mempunyai lingkup yang luas dan terintegrasi ke seluruh Indonesia sehingga data-data setiap instansi pemerintah terekam ke dalam satu server dan informasi yang dihasilkan saling terhubung. Penerapan SIPD pada setiap instansi pemerintah

untuk menyelaraskan penggunaan sistem sehingga mempermudah setiap instansi dalam menginput perencanaan dan penganggaran, sehingga mendorong proses pelaksanaan pemerintah yang inovatif dan kreatif. Hal ini berarti SIPD terhubung dengan setiap instansi yang ada di Indonesia, sedangkan aplikasi SIPKD mempunyai lingkup yang kecil, hanya OPD pada daerah tertentu yang menggunakannya.

Keterbatasan Peneliti dalam melakukan penelitian yaitu tidak dapat melakukan konfirmasi data kepada Organisasi Perangkat Daerah lain karena keterbatasan waktu penelitian jadi hanya dapat melihat penerapan SIPD pada satu Organisasi Perangkat Daerah yaitu BPKAD Kota Pekanbaru. Peneliti hanya dapat mewawancarai tiga informan, yaitu bidang anggaran, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang perbendaharaan, karena kesulitan dalam penyesuaian waktu dengan informan penelitian.

Dengan keterbatasan peneliti melakukan penelitian, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya lebih baik melakukan penelitian di beberapa OPD serta adanya agar dapat melihat dan membandingkan penerapan SIPD dengan OPD lain dan menggunakan informan yang lebih dan melibat kepala badan sebagai informan penelitian

Daftar Pustaka

- (Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). The Relationship Between The Use Of A Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, And The Performance Of Public Sector Organizations, *Journal Of Indonesian Economy And Business*, Vol. 31 (1-21).
- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Balqis, N., & Zuhrizal, F. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*, Vol. 7 (117-121)
- Balqis, N., Zuhrizal, F., & Mauliyanda. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Vol. 11 (146-161)
- DiMaggio, P. J., & W. W. Powell. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional And Collective Rationality In Organizational Field. *American Sociological Review*, Vol. 48 (147-160)
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Otonomi*, Vol. 21, (62-79).
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, (7-130)
- Grandis, E. T. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 (103-113)
- Irwantos, F. E. (2021). *Peran Bappeda Dalam Penerapan Pembangunan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Thesis, Universitas Medan Area, 2021.

- Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics Di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, (69-90)
- Karundeng, A. B. Kaawoan, J., & Pangemanan, S. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, Volume 1 (1-8)
- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar. Kedai Askara.
- Khoirunnisa, N. (2021). *Analisis Penerapan dan Implementasi SIPKD Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kecamatan Kelapa Gading*. Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2021.
- Mette, D. V. & Carl, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Sage, Vol 6, 1975.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publisher
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. USA: Sage Publisher
- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustawan. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting And Business Journal*, Vol. 2 (214-223)
- Nasution, M.I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 9 (109-116)
- Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- Putri, R. K. (2021). *Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Untuk Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Tingkat Desa Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021
- Sofyani, A., & akbar, R. (2015) Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah Dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institusional. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, Vol. 9 (153-173)
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Winarno., Kusnadi, A., & Afriliana, N. (2019). Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang. *Prosiding PKM-CSR*, Vol. 2 (122-128)
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado. *EKSEKUTIF Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 2 (1-13)